

ANALISIS KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN MAGELANG

Eny Boedi Orbawati

Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Magelang

ABSTRACT

Based on the Law number 8, 2005 which regulateds the authority of village there are five basic principles in regulating the authority of village. They are : diversities, community participation, original autonomy, village – level democratization and community empowerment. The common problem found in regional autonomy is how the operation of that authority is run to be suited with the existing condition and capability of the village. When the euphoria and the spirit to realize village autonomy are not formulated in definite regulations, then what happens is none other than the potentiality of effect demonstration that is the decline of village government institution as a result of being powerless to bear the work burden and the authority which it owns. That's why when we scrutinize, what happens in villages is that government is run according to instincts following the traditions inherited. There are many decision – makers in village level (Head of Village and Village consultative body) who do not know how to develop their village potentialities the result is that the existing village autonomy does not give positive contribution for the village empowerment as a whole. There are still many villages which lag behind in social as well as development activities because they are unable to recognize the potentialities which they own. There are still many villages which still do not have a clear idea to realize the heavy burden at authority which they regard as their right while in reality they are powerless in realizing it.

Key words : the authority of village, village level democratization and community empowerment.

A. PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menimbulkan terjadi perubahan yang strategis dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di desa. Meskipun perubahan strategis ini tidak

menghilangkan komitmen pemerintah dalam upaya membangun otonomi desa, namun dalam pelaksanaannya diciptakan sebuah koridor sebagai bingkai dalam upaya penciptaan otonomi desa.

Otonomi desa bermakna adanya kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya kewenangan ini maka desa serta masyarakatnya diharapkan mampu untuk tumbuh maju dan berkembang dengan karsa dan kreativitasnya untuk memberdayakan berbagai potensi yang ada di desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Masalah umum dalam otonomi daerah adalah bagaimana penyelenggaraan kewenangan tersebut dilaksanakan disesuaikan dengan kondisi keadaan dan kemampuan desa yang ada. Ketika *euforia* dan semangat mewujudkan otonomi desa tidak dibingkai dengan aturan yang jelas, maka yang terjadi adalah potensi terjadinya "*demonstration effect*" yaitu runtuhnya lembaga pemerintahan desa sebagai akibat tidak mampu beban kerja dan kewenangan yang dimilikinya.

Oleh karena itu apabila kita cermati secara seksama, yang menjadi persoalan adalah bahwa pemerintahan di desa berjalan secara naluri mengikuti kebiasaan yang dilaksanakan secara turun-temurun. Banyak pengambil kebijakan di tingkat pemerintahan desa (Kepala Desa dan Barmusdes) tidak mengetahui potensi desanya yang untuk dikembangkan. Akibatnya otonomi desa yang ada tidak memberikan kontribusi positif bagi upaya pemberdayaan desa secara keseluruhan. Banyak desa yang tetap tertinggal dalam kegiatan sosial dan pembangunan karena tidak mampu mengenali potensi-potensi yang dimilikinya. Banyak juga desa yang masih belum memiliki gambaran yang jelas untuk melaksanakan beban kewenangan yang besar yang dianggapnya sebagai hak namun sesungguhnya tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Dengan demikian identifikasi tentang kewenangan desa saat ini menjadi sangat relevan dan mendesak. Identifikasi ini menitik beratkan pada pemotretan mengenai seberapa besar kemampuan kewenangan yang dimiliki oleh desa, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu dengan menggambarkan kebenaran secara cermat tentang apa yang terjadi di lapangan, dengan menggunakan catatan terhadap dokumen tertulis, interview mendalam

dengan melakukan analitik terhadap rekaman-rekaman tersebut. Data dan informasi yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif dan dilengkapi dengan analisis kuantitatif, yaitu dalam bentuk penyajian data melalui tabel-tabel yang menghasilkan ukuran kuantitatif.

C. PEMBAHASAN

Analisis kelayakan kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh desa di Kabupaten Magelang merupakan analisis kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh desa serta kewenangan lain yang dimungkinkan mampu dilaksanakan desa. Beberapa kewenangan tersebut mencakup kewenangan di bidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, kepariwisataan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, penataan ruang, pertanahan, permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, politik dalam negeri dan administrasi publik, pengembangan otonomi daerah, perimbangan keuangan, kependudukan, olah raga, perencanaan pembangunan, penerangan / informasi dan keagamaan.

Dalam analisis ini akan dirinci semua urusan yang sebagian besar telah dilaksanakan oleh desa selama ini.

Analisis ini akan menggunakan kriteria-kriteria, yaitu :

Economic of Scale (EOS), *Eksternalitas* (E) dan *Akuntabilitas* (AKK), EOS mengacu kepada penyelenggaraan kewenangan asli oleh desa menciptakan tingkat efisiensi, yaitu kesesuaian antara skala ekonomis dengan cakupan area pelayanan. Semakin luas wilayah pelayanan dan skala ekonomis yang diperlukan pun lebih besar, semakin tinggi otoritas yang diperlukan. Dalam analisis diberikan skala antara 1 sampai dengan 5.

Eksternalitas, mengacu kepada dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan suatu kewenangan. Semakin besar dampak yang mungkin timbul, maka semakin besar pula otoritas yang diperlukan.

Akuntabilitas mengacu kepada kedekatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

Ukuran untuk mengetahui kelayakan dari masing-masing kriteria adalah sebagai berikut :

- | | | |
|-------|---|--|
| EOS | : | <i>Economic of Scale</i> / besaran kegiatan secara ekonomi |
| Kecil | : | kewenangan layak diberikan kepada Desa |

| | | |
|--------|---|--|
| Sedang | : | kewenangan cukup layak diberikan kepada Desa |
| Besar | : | kewenangan tidak layak diberikan kepada desa |
| E | : | <i>Eksternalitas / dampak dan otoritas</i> |
| Kecil | : | kewenangan layak diberikan kepada Desa |
| Sedang | : | kewenangan cukup layak diberikan kepada Desa |
| Besar | : | kewenangan tidak layak diberikan kepada desa |
| Ak | : | <i>Akuntabilitas / kemudahan pelayanan</i> |
| Kecil | : | kewenangan layak diberikan kepada Desa |
| Sedang | : | kewenangan cukup layak diberikan kepada Desa |
| Besar | : | kewenangan tidak layak diberikan kepada desa |

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan

Tabel 1
Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Pertanian,
Perikanan dan Peternakan

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|---|--------|--------|-------|-------------|--------------|
| 1 | Penggarapan awal tanam padi | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 2 | Penggarapan tanah kosong | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 3 | Pembelian bibit bersama | Besar | Besar | Sulit | Tidak layak | Otonomi |
| 4 | Pengaturan tanaman pagar | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 5 | Pengelolaan tanaman pekarangan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 6 | Membasmi tikus, anjing, babi hutan dan hama tanaman pertanian lainnya | Kecil | Sedang | Mudah | Cukup layak | Otonomi |
| 7 | Koordinasi antar kelompok tani | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 8 | Membina kelompok tani | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 9 | Pendataan dan pelaporan hasil pertanian | Sedang | Kecil | Cukup | Cukup layak | Pembantuan |
| 10 | Penyebarkan informasi dan promosi peternakan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 11 | Fasilitator penyuluhan pertanian | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 12 | Penyediaan lahan percobaan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|---|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 13 | Pengawasan pengolahan hasil pertanian | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 14 | Pengawasan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah desa | Kecil | Kecil | Cukup | Cukup Layak | Pembantuan |
| 15 | Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu | Kecil | Kecil | Cukup | Layak | Pembantuan |
| 16 | Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 17 | Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan | Besar | Besar | Mudah | Tidak layak | Otonomi |
| 18 | Pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis pertanian | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 19 | Pertumbuhan dan pengembangan kelembagaan pertanian | Kecil | Besar | Mudah | Cukup layak | Otonomi |
| 20 | Pengelolaan balai benih ikan yang ada di desa | Besar | Besar | Mudah | Tidak layak | Otonomi |
| 21 | Pengawasan lalu lintas ternak yang ada di dalam desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 22 | Pemungutan retribusi rumah potong hewan yang ada di desa | Besar | Kecil | Cukup | Cukup layak | Otonomi |
| 23 | Penyelenggaraan kebun bibit hijauan pakan ternak | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 24 | Pemberian ijin usaha penangkar benih / bibit pertanian | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 25 | Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 26 | Mengadakan tanaman rumput | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 27 | Pengusahaan tanaman rumput | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 28 | Pengumpulan makanan ternak untuk persediaan di musim kemarau | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|---|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 29 | Menjaga hewan ternak yang digembala di hutan yang diizinkan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 30 | Mengadakan kandang desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 31 | Pengebirian hewan jantan | Kecil | Kecil | Sulit | Tidak Layak | Otonomi |
| 32 | Mengadakan pasar hewan | Besar | Besar | Cukup | Tidak Layak | Otonomi |
| 33 | Mengatur penjualan hewan ternak | Besar | Besar | Cukup | Tidak Layak | Otonomi |
| 34 | Mencegah dan menjaga penyakit hewan | Kecil | Kecil | Cukup | Layak | Otonomi |
| 35 | Membantu aparat pemerintah mengadakan pameran hewan ternak | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 36 | Mengadakan pemeliharaan hewan ternak untuk memperbaiki jenis hewan ternak | Kecil | Kecil | Cukup | Layak | Pembantuan |

Dalam bidang pertanian ini, nampak bahwa kewenangan-kewenangan desa mengalami perubahan yang drastis sesuai dengan perubahan lingkungan. Urusan-urusan yang dulunya menjadi urusan asal-usul, seperti pembelian bibit bersama, penggarapan tanah kosong, telah menjadi urusan dukuh atau masyarakat. Selain itu pula dipahami bahwa urusan pertanian merupakan urusan yang kompleks dan sangat dipengaruhi oleh factor eksternal, sehingga menyulitkan desa dalam mengelola urusan ini, seperti harga padi yang sangat dipengaruhi oleh hukum pasar.

Desa selama ini hanya melakukan koordinasi dengan P3A, mengatur pola tanam dan mendorong KUD untuk menjadi aktor penting dalam menampung produksi padi petani. Desa juga memonitor jerami yang akan dijual kepada pabrik jamur, guna persediaan pada waktu musim kemarau.

Dalam bidang peternakan, desa dapat melakukan pemantauan / pengontrolan jual beli ternak di desa atau antar desa, karena skala ekonomi dan eksternalitasnya kecil dengan cara membuat kartu jual beli ternak. Untuk itu desa yang berdekatan satu sama lain dan mempunyai lahan yang potensial untuk dikembangkan menjadi pasar hewan ini tidak ada lagi retribusi jual beli ternak sapi, tetapi diganti dengan pungutan jual beli ternak yang menjadi milik

desa. Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Dinas Perikanan dan Peternakan yang berfungsi memonitor jual beli ternak dan memberikan pelayanan kesehatan hewan dengan menyediakan dokter hewan.

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Pertambangan dan Energi

Tabel 2

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Pertambangan dan energi

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|---|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 1 | Pengelolaan pasir galian C tanpa alat berat | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 2 | Pembentukan kelompok penambang dan pengawasan dan pembinaan terhadap pertambangan kecil | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 3 | Rekomendasi ijin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan | Kecil | Kecil | Mudah | Tidak layak | Pembantuan |
| 4 | Rekomendasi pemberian penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 5 | Rekomendasi ijin dan pengawasan pengelolaan bahan galian golongan A dan B | Kecil | Kecil | Mudah | Tidak Layak | Pembantuan |
| 6 | Rekomendasi ijin pembangunan tenaga listrik yang baru | Besar | Besar | Sulit | Layak | Pembantuan |
| 7 | Rekomendasi ijin penambangan | Kecil | Kecil | Mudah | Tidak Layak | Pembantuan |
| 8 | Penyajian data dan informasi | Kecil | Besar | Sulit | Layak | Pembantuan |
| 9 | Fasilitator penyuluhan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |

Dari beberapa desa yang mempunyai penambangan golongan C, terdapat beberapa kewenangan yang layak menjadi kewenangan desa antara lain : pengolahan lokasi galian C tanpa alat berat, pembentukan kelompok penambang dan pengawasannya, sedangkan kewenangan-kewenangan lainnya menjadi tugas pembantuan saja. Alasan yang dikemukakan adalah kemudahan pengawasan, dampak lingkungan yang ditimbulkan dan skala ekonomi yang

kecil dalam ruang lingkup desa saja. Dua urusan yang akan menjadi kewenangan dalam rangka otonomi desa pun menjadi eksternalitas yang kecil, karena dalam ruang lingkup yang kecil pula. Dengan kewenangan yang dimilikinya, desa dapat memperkecil eksternalitas negatif dengan membuat peraturan-peraturan seperti pungutan desa, membentuk petugas pengawas yang bekerja sama dengan Bamurdes dan membuat sistem *free* untuk pemungut.

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Kehutanan dan Perkebunan

Tabel 3

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Kehutanan dan Perkebunan

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|---|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 1 | Pelaksanaan penanggulangan hama eksplosif | Besar | Besar | Sulit | Tidak layak | Pembantuan |
| 2 | Pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 3 | Pengawasan pelaksanaan perluasan tanaman perkebunan | Kecil | Kecil | Sulit | Tidak layak | Pembantuan |
| 4 | Menjaga hutan negara | Besar | Besar | Sulit | Tidak layak | Pembantuan |
| 5 | Membantu memadamkan kebakaran hutan dan tanaman | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 6 | Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang telah diserahkan kepada desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun desa. | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 7 | Pemberian ijin pengelolaan perlebahan non budidaya | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 8 | Pengawasan pengambilan hasil hutan non kayu dalam ulayat desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 9 | Pengelolaan hutan desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 10 | Pengawasan terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi. | Besar | Besar | Mudah | Layak | Pembantuan |

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|--|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 11 | Pemberian rekomendasi ijin pengelolaan hutan yang ada dalam desa kepada pihak ketiga | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 12 | Menyediakan lahan pembibitan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 13 | Membantu pencatatan penebangan kayu | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 14 | Mengawasi hutan dari penebangan liar | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 15 | Rekomendasi surat ijin tebang | Besar | Besar | Mudah | Tidak Layak | Pembantuan |
| 16 | Melaksanakan program penghijauan | Besar | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 17 | Mengkoordinir penyuluhan kehutanan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |

Dalam mengurus masalah kehutanan ini perlu dipertimbangkan untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi karena membutuhkan pertimbangan-pertimbangan obyek dari hasil kajian dan penelitian maupun sumber daya manusia yang dinilai lebih berpendidikan.

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 4

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Perindustrian dan Perdagangan

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|---|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 1 | Mengadakan perkreditan melalui lumbung desa dan bank desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 2 | Membangun dan mengembangkan pasar desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 3 | Mengadakan pemupukan modal melalui usaha ekonomi desa | Kecil | Kecil | Mudah | Tidak Layak | Otonomi |
| 4 | Pengawasan pencemaran limbah industri | Besar | Besar | Mudah | Tidak Layak | Pembantuan |

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|---|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 5 | Rekomendasi surat ijin dalam bidang usaha perindustrian yang ada di desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 6 | Pengawasan terhadap penggunaan alat UTTP (ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya) | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 7 | Pengelolaan pasar desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 8 | Fasilitator perijinan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 9 | Rekomendasi ijin usaha | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 10 | Penyajian data dan informasi mengenai industri dan perdagangan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |

Pada sektor perindustrian dan perdagangan di tingkat desa usaha yang telah dilakukan adalah usaha perkreditan dan pemupukan modal. Usaha ini terbentur pada aturan perbankan yang mensyaratkan aturan-aturan umum perkreditan rakyat. Harapannya adalah desa diberi keleluasaan pengelolaan perkreditan desa. Untuk usaha sektor riil yang dilakukan warga, desa berfungsi sebagai fasilitator pemasaran.

Keberadaan Pasar desa yang selalu ini kadang menimbulkan masalah antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten, perlu dilakukan penjanjian bagi hasil, karena selama ini desa menyediakan tanah kasnya, sedangkan Pemerintah Kabupaten membangunnya. Pemerintah Desa melalui Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan / Kaur Pembangunan dapat melakukan pengawasan. Sedangkan pada desa-desa yang mempunyai pasar desa tanpa campur tangan Pemerintah Kabupaten, desa mempunyai otoritas menarik retribusi desa.

Pemerintah desa dalam kaitan rekomendasi ijin usaha bidang perindustrian melakukan fungsi pengawasan. Apabila dibangun industri di desa bersangkutan, maka pemerintah desa dapat membuat kesepakatan rekrutmen tenaga kerja yang berasal dari desa setempat. Kesepakatan antara desa dan investor terutama dalam rekrutmen tenaga kerja, dampak lingkungan dan keamanan berusaha.

Sedangkan untuk usaha perkreditan yang dapat dikembangkan di desa sangat terhambat oleh peraturan perbankan. Sebenarnya desa cukup mampu melaksanakan usaha dalam bentuk pembentukan badan usaha. Rencana

pemberian dana abadi untuk desa dapat diarahkan pada penguatan ekonomi desa dengan memberdayakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang telah tumbuh di desa yang bersangkutan.

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Perkoperasian

Tabel 5
Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Koperasi

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|--|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 1 | Rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi | Kecil | Besar | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 2 | Rekomendasi dan pengawasan dana kredit program pada koperasi | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 3 | Rekomendasi pemberian kredit program pada koperasi | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 4 | Penyajian data tentang koperasi | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 5 | Koordinator kegiatan pembinaan koperasi dengan kecamatan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 6 | Mendirikan badan usaha milik desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 7 | Mendirikan KUD / KUT | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |

Keberadaan koperasi di Desa merupakan salah satu kegiatan penunjang dalam perekonomian yang dapat secara langsung meningkatkan pendapatan masyarakat desa itu sendiri.

Desa dapat berperan dalam mencari tenaga-tenaga pelatih dalam aspek manajemen ataupun lainnya sesuai kebutuhan dari koperasi. Desa dapat menyelenggarakan acara-acara pelatihan untuk meningkatkan kualitas koperasi.

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Penanaman Modal

Tabel 6

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Penanaman Modal

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|---|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 1 | Fasilitator pemberian kredit dari bank | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 2 | Rekomendasi ijin | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 3 | Kerjasama dengan investor / pemilik modal | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 4 | Pendirian kios / toko desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |

Selama ini yang terjadi banyak desa yang menyewakan tanahnya dengan harga yang sangat murah dan jangka panjang kepada para investor. Seharusnya jangan hanya sekedar sistem sewa, tetapi dengan tanah kas desa itu, desa memiliki saham terhadap perusahaan, sehingga pada akhir tahun desa memperoleh SHU yang cukup besar. Dengan sistem SHU seperti ini desa mendapat keuntungan yang cukup besar dibandingkan dengan sistem sewa tanah.

Sebenarnya pengurusan perijinan mengenai kerjasama desa dengan pihak ketiga itu mudah dan lancar, walaupun perijinan itu sampai ke Gubernur, hanya sekitar 3 bulan sudah dapat turun. Dalam masalah perijinan ini, seharusnya desa diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi. Maka perlu ada penggalan pemberian ijin prinsip yang berlaku 1 tahun itu ke pemerintah desa. Desa yang tahu dampak positif maupun negatif dari adanya suatu kegiatan, maka desa harus diberi kewenangan untuk menyetop kegiatan itu jika memang terbukti merugikan masyarakat.

Dalam masalah status tanah, BPN memang berkewenangan untuk mengurus masalah status tanah ini. Namun demikian desa seharusnya diberi kewenangan untuk menentukan ijin lokasi. Desa yang lebih mengetahui dimana lokasi yang produktif dan dimana lokasi yang tidak produktif.

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Kepariwisata

Tabel 7
Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Pariwisata

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|--|-------|-------|--------|-------------|--------------|
| 1 | Pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata | Kecil | Kecil | Sedang | Cukup Layak | Otonomi |
| 2 | Pengelolaan tempat camping / perkemahan dalam desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 3 | Pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 4 | Izin dan pengawasan pondok wisata pada kawasan wisata yang ada di desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 5 | Pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada dalam desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |

Dalam hal urusan wisata, desa selama ini telah banyak melakukan kegiatan yang mendukung wisata. Diantaranya adalah pengelolaan parkir. Ini perlu diteruskan karena yang dapat menjaga keamanan tempat wisata adalah pihak desa, mendirikan warung atau kios, dengan memprioritaskan bagi warga setempat untuk mendirikan kios tersebut. Desa juga diberi kewenangan untuk mengontrol kegiatan wisata agar tidak menjurus pada penyakit masyarakat. Tarif masuk tempat wisata hendaklah jangan terlalu tinggi atau memberatkan. Jangan mencari keuntungan besar tetapi hanya sesaat saja. Desa perlu diberi kewenangan untuk mengatur dan mengontrol harga makanan dan barang agar dapat sesuai dengan prinsip kewajaran harga yang berlaku.

Masalah perijinan mendirikan warung, sebaiknya apabila warung kecil (di bawah 30 orang), maka yang berhak memberikan ijin adalah desa. Masa berlaku ijin ini sebaiknya 3 tahun.

Kegiatan camping selama ini yang tidak diketahui oleh pihak desa, tidak perlu lebih diatur pengawasannya. Padahal masalah keamanan dan ketertiban pada akhirnya yang bertanggung jawab adalah desa. Oleh karena itu ijin untuk melakukan kegiatan camping sebaiknya diserahkan kepada desa. Penentuan

tanah atau lokasinya juga desa. Dan tanah yang digunakan untuk kegiatan itu tanah kas desa.

Penataan bangunan / fasilitas fisik wisata seharusnya dapat dikerjakan oleh desa sehingga dapat lebih membantu kegiatan masyarakat untuk ikut berperan dalam bidang pariwisata.

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Ketenagakerjaan

Tabel 8
Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Tenaga Kerja

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|---|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 1 | Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 2 | Menginformasikan kepada masyarakat tentang lowongan pekerjaan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 3 | Rekomendasi surat-surat | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 4 | Penyajian data ketenagakerjaan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 5 | Fasilitator penyuluhan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |

Dalam urusan ketenagakerjaan, desa dapat diberi peran dalam memberikan rekomendasi bagi para pencari kerja yang mengajukan lamaran pekerjaan. Pemerintah desa dapat menerangkan bahwa pencari kerja tersebut memang benar warga desa setempat.

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Kesehatan

Tabel 9
Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Kesehatan

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|---|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 1 | Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 2 | Kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa dengan memberikan laporan 1x 24 jam | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 3 | Pengawasan, dukun bayi, bidan desa dan polindes | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 4 | Pelaksanaan posyandu | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 5 | Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 6 | Pengelolaan dana kesehatan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 7 | Kegiatan makanan tanaman obat keluarga | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 8 | Mendatangkan penduduk pada saat ada program kesehatan nasional seperti PIN, Bulan vitamin A dll | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 9 | Mengantarkan orang sakit atau menganjurkan orang sakit dengan memberikan rekomendasi kepada penduduk yang membutuhkan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 10 | Mengadakan penyuluhan kesehatan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 11 | Pendataan kesehatan masyarakat | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 12 | Fasilitator penyuluhan kesehatan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 13 | Pemantauan wabah penyakit | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 14 | Pembentukan kader kesehatan desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |

Dalam urusan kesehatan, desa dapat diberi peran dalam penyediaan fasilitas tanah dan bangunan untuk kegiatan kesehatan di desa. Namun demikian, karena tenaga-tenaga ahli kesehatan di desa masih langka, maka sebaiknya, tenaga-tenaga ahli itu tetap didatangkan dari Kabupaten. Jadi dalam hal ini desa hanya bersifat membantu. Jadi pada dasarnya desa dapat membantu menyediakan atau memfasilitasi berbagai keperluan kegiatan kesehatan di desa.

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 9
Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Kesehatan

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|---|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 1 | Berpartisipasi dalam penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP dan SLTA | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 2 | Menyajikan data tentang pendidikan dan kebudayaan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 3 | Pembinaan dan penyuluhan pengembangan kesenian dan kebudayaan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 4 | Rekomendasi untuk memberikan surat keterangan bea siswa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 5 | Ikut memberikan kontribusi untuk melengkapi dan merawat serta merehabilitasi sarana pendidikan seperti pembangunan fisik, gedung, mebelair, pengadaan sarana laboratorium, perpustakaan dan buku pegangan siswa | Besar | Besar | Sulit | Tidak Layak | Pembantuan |
| 6 | Ikut memberikan kontribusi peningkatan kesejahteraan tenaga pendidikan seperti uang, lelah, kelebihan jam mengajar, transportasi dan perumahan guru untuk daerah terpencil | Besar | Besar | Sulit | Tidak Layak | Pembantuan |

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|---|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 7 | Menyelenggarakan kursus atau pelatihan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 8 | Meningkatkan peran taman bacaan masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 9 | Ikut memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 10 | Menggal, membina dan mengembangkan bermacam seni yang hidup dan tumbuh di desa baik seni tradisional maupun seni modern | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 11 | Ikut memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 12 | Mengorganisasi kesenian tradisional | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |

Desa-desanya di Kabupaten Magelang mempunyai banyak kewenangan dalam pendidikan dan kebudayaan yang sudah ada sejak dulu yaitu dalam hal penyediaan lahan untuk pendirian gedung sekolah dan pembantuan untuk penerimaan murid terutama sekolah dasar. Pada saat ini dimungkinkan kewenangan desa lebih luas lagi terutama apabila belum ada TK di desa, pemerintah desa secara otonom bisa mendirikan. Pemerintahan desa sekarang mulai pula dilibatkan dalam pengawasan pemeliharaan sekolah maupun terlibat dalam komite sekolah. Sedangkan pada urusan pendidikan lainnya pemerintah desa lebih menempatkan dirinya dalam tugas pembantuan. Tetapi peran desa yang cukup adalah pada sektor kebudayaan. Pemerintah desa mempunyai kewenangan mengorganisir kelompok kesenian dan melaksanakan sepenuhnya adat istiadat yang ada.

Dengan keterlibatan desa dalam komite sekolah diharapkan juga keterlibatan sekolah di dalam pemeliharaan prasarana fisik sekolah melalui keterlibatan langsung di dalam proyek-proyek rehabilitasi gedung sekolah. Desa dapat berperan di dalam pengawasan di dalam pembangunan atau rehab gedung sekolah-sekolah.

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Sosial, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 11
Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Sosial, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|---|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 1 | Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 2 | Pembinaan pekerja sosial masyarakat dan organisasi sosial | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 3 | Mengeluarkan surat keterangan miskin | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 4 | Pengurusan orang terlantar | Kecil | Kecil | Sulit | Tidak Layak | Pembantuan |
| 5 | Memberikan rekomendasi permintaan bantuan pada pemerintah desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 6 | Rekomendasi ijin keramaian di desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 7 | Penanggulangan bencana alam skala desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 8 | Pengawasan dan pemberian ijin penyewaan kaset video, play station, dl | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 9 | Inventaris penduduk penyandang cacat sosial | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 10 | Penyalur bantuan untuk orang miskin | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 11 | Pembinaan kepada organisasi sosial desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 12 | Mengeluarkan surat rekomendasi keringanan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 13 | Menyantuni anak-anak miskin dan putus sekolah | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Penataan Ruang

Tabel 12

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Penataan Ruang

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 1 | Rekomendasi IMB | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 2 | Penyajian data pemanfaatan ruang desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |

Masalah yang dihadapi desa adalah adanya ketidak cocokan pemanfaatan lahan yang sudah ada dengan keputusan dari kabupaten. Pengaturan tata ruang untuk kegiatan industri, untuk lahan pertanian, permukiman penduduk belum direncanakan secara matang dan terkoordinasi. Untuk itu diperlukan kewenangan desa untuk ikut memberikan pertimbangan dalam pemanfaatan tata ruang.

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Pertanian

Tabel 13

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Pertanian

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|---|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 1 | Memberikan surat keterangan atas hak atas tanah | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 2 | Penetapan batas desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 3 | Penetapan batas tanah ulayat desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 4 | Penyelesaian sengketa tanah tingkat desa | Kecil | Besar | Sulit | Layak | Otonomi |

Urusan pertanian khususnya dalam segi status tanah merupakan kewenangan dari BPN, sehingga desa tidak mempunyai kewenangan untuk mencampurinya. Akan tetapi desa mempunyai kewenangan untuk menentukan

lokasi kegiatan yang akan dibangun. Untuk itu desa berhak untuk memberikan pertimbangan pemberian ijin penggunaan tanahnya.

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Permukiman

Tabel 14
Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Permukiman

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|---|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 1 | Rekomendasi pembukaan permukiman baru | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 2 | Penyajian data permukiman | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 3 | Fasilitator penyuluhan permukiman sehat | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 4 | Penataan kembali permukiman pasca bencana | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 5 | Pengawasan pelaksanaan ijin prinsip | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |

Permasalahan di bidang permukiman adalah masih adanya tanah-tanah produktif yang digunakan untuk permukiman, oleh karena itu desa harus diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi penggunaan tanah tersebut.

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Pekerjaan Umum

Tabel 15
Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Pekerjaan Umum

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|--|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 1 | Pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang berada di desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 2 | IMB yang berada di desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|---|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 3 | Irigasi desa yang meliputi pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 4 | Pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan air bersih, jaringan irigasi, pemompaan, saluran tersier yang ada di desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 5 | Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 6 | Mengurus pekerjaan umum | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 7 | Mengurus benda-benda milik desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 8 | Penyajian data tentang kondisi fisik bangunan umum | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |

Pelaksanaan kewenangan desa dalam bidang pekerjaan umum hendaknya tetap dalam koordinasi dengan pemerintah di atasnya karena berhubungan dengan nilai ekonomi yang cukup besar, sehingga desa tidak mampu untuk membiayai secara mandiri.

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Perhubungan

Tabel 16
Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Perhubungan

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|---|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 1 | Pengelolaan parkir / pemangkalan kendaraan di pasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di dalam desa. | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 2 | Pembangunan dan pengawasan jalan desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | |

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|---|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 3 | Pengawasan dan pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 4 | Pengawasan kelas jalan kabupaten yang ada di desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 5 | Monitoring terhadap kondisi jalan umum | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 6 | Penyajian data tentang kondisi jalan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 7 | Memberi ijin penggunaan lahan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |

Dalam kewenangan sektor perhubungan maka diperlukan usaha atau kegiatan yang perlu dilakukan yaitu :

1. Perlunya swakelola jalan desa yang dilakukan oleh desa sendiri tanpa campur tangan pihak ketiga (pemborong).
2. Adanya penyaluran dana dari atas dengan model pemberdayaan masyarakat.
3. Pembatasan berat kendaraan yang masuk jalan desa.
4. Memungut retirbusi bagi kendaraan yang lewat untuk biaya pemeliharaan.
5. Monitoring dan pengawasan terhadap jalan desa secara kontinue.

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Lingkungan Hidup

Tabel 17

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Lingkungan Hidup

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|---|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 1 | Fasilitator penyuluhan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 2 | Monitoring kerusakan lingkungan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 3 | Penyajian data tentang lingkungan hidup | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|---|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 4 | Penetapan anggaran desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 5 | Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 6 | Penetapan peraturan desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 7 | Kerjasama antar desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 8 | Mengeluarkan surat rekomendasi | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 9 | Pendataan organisasi sosial masyarakat | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 10 | Menyajikan data dan informasi tentang kegiatan desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 11 | Penjagaan gardu desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 12 | Membuat dan memelihara gardu desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 13 | Penjagaan lumbung desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 14 | Penjagaan kantor desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 15 | Patroli desa / ronda | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 16 | Pembentukan hansip desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 17 | Koordinasi dan monitoring penyuluhan ketentraman dan ketertiban wilayah | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 18 | Penanggulangan bencana alam | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 19 | Menyelenggarakan pelayanan umum | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 20 | Pengelolaan arsip desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |

Secara politik dan administrasi kewenangan tersebut di atas memang sudah melekat di dalam kewenangan desa itu sendiri.

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Pengembangan Otonomi Daerah

Tabel 19

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Pengembangan Otonomi Daerah

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|--|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 1 | Fasilitator kegiatan koordinasi | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 2 | Sosialisasi program-program pemerintah daerah ke dusun | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 3 | Melakukan rapat koordinasi dengan perangkat desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 4 | Melakukan koordinasi dengan dusun | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 5 | Sosialisasi rencana pembangunan dengan masyarakat | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 6 | Pengawasan terhadap pembangunan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 7 | Pengawasan obyek-obyek pembangunan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 8 | Menyusun rencana pembangunan desa dengan Bamurdes | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 9 | Pengendalian pembangunan desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 10 | Evaluasi pembangunan desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |

Dengan era otonomi pada saat ini maka pemerintah desa telah meletakkan dasar-dasar pengembangan otonomi desa yang akan dilaksanakan. Hanya diperlukan sosialisasi kepada masyarakat setempat.

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Perimbangan Keuangan

Tabel 20
Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Perimbangan Keuangan

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 1 | Penggalian PADA | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 2 | Melakukan pungutan desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 3 | Menyusun anggaran pembangunan desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 4 | Mengelola retribusi desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |

Sektor perimbangan keuangan desa setelah diberlakukannya perda tentang pemerintah daerah maka desa dinilai layak menjadi kewenangan desa. Hal ini dilakukan dengan menggunakan prinsip ekonomis, eksternalitas dan akuntabilitas.

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Kependudukan

Tabel 22
Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Kependudukan

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|--|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 1 | Penerbitan KTP dan KK | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 2 | Melakukan pendataan dan pembinaan dalam mutasi dan persebaran penduduk | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 3 | Pengawasan terhadap peredaran alat kontrasepsi | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 4 | Pelaksanaan penyuluhan KB | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 5 | Pembinaan terhadap kader KB | Besar | Kecil | Sulit | Tidak Layak | Otonomi |
| 6 | Rekomendasi akte kependudukan / kelahiran | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|---|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 7 | Penyajian data dan informasi tentang kependudukan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 8 | Koordinasi masalah transmigrasi | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 9 | Membuat peta monografi dan statistik kependudukan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 10 | Fasilitator penyuluhan kependudukan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 11 | Pembuatan surat kelahiran dan kematian | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |

Adanya kewenangan di sektor kependudukan yang sekarang lebih banyak dilakukan oleh desa maka diperlukan batasan-batasan kewenangan tersebut.

Olah Raga

Tabel 22
Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Olah Raga

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|--|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 1 | Fasilitator penyuluhan olah raga | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 2 | Rekomendasi mengikuti turnamen / lomba | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 3 | Penyebaran informasi olah raga | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 4 | Menyediakan fasilitas olah raga | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |

Kegiatan olah raga yang ada di desa saat ini belum sepenuhnya menjadi kewenangan desa hal ini dikarenakan masih kurangnya fasilitas pendukung kegiatan olah raga yang ada.

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Perencanaan Pembangunan

Tabel 23

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Perencanaan Pembangunan

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|---|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 1 | Pendataan potensi desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 2 | Penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |

Pada sektor ini, masih banyak ditemui di lapangan bahwa aparat desa belum sepenuhnya mengetahui potensi yang ada di desa mereka tersebut, padahal kewenangan berada di desa tersebut.

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Penerangan / Informasi dan Komunikasi

Tabel 24

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Penerangan dan Komunikasi

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|---|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 1 | Sosialisasi hukum dan perda kepada masyarakat | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 2 | Sosialisasi program kerja pemerintah | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 3 | Pembinaan kelompok komunikasi sosial | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 4 | Pengawasan peredaran film keliling | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 5 | Pemberian ijin pengelolaan tempat hiburan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |
| 6 | Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Pembantuan |

Pada sektor ini pemerintah desa belum banyak berperan, tetapi lebih banyak dalam hal tugas pembantuan. Urusan otonomi lebih banyak dilakukan pada pembinaan kelompok-kelompok sosial yang ada.

Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Bidang Keagamaan

Tabel 25
Analisa Kelayakan Kewenangan Desa Sektor Keagamaan

| No. | Kewenangan | EOS | E | AK | Klasifikasi | Jenis Urusan |
|-----|----------------------------|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 1 | Pemeliharaan tempat ibadah | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 2 | Mengadakan sedekah bumi | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 3 | Mengadakan ruwah desa | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |
| 4 | Mengadakan sadranan | Kecil | Kecil | Mudah | Layak | Otonomi |

Bidang keagamaan lebih banyak dilakukan secara penuh oleh masyarakat setempat.

D. SIMPULAN

Perwujudan otonomi masyarakat desa adalah suatu proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi menuju kehidupan masyarakat desa yang diatur dan digerakkan oleh masyarakat dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Otonomi masyarakat desa dicirikan oleh adanya kemampuan masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri, kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai perwujudan atas pelayanan terhadap masyarakat dari segi administrasi pemerintahan dan pelayanan umum.

Dengan demikian untuk mewujudkan otonomi desa maka ada beberapa rekomendasi yang bisa digunakan untuk mengatur tentang kewenangan desa :

1. Perlunya perangkat hukum yang mengatur kewenangan desa. Dengan demikian desa mampu membuat kebijakan-kebijakan yang tepat yang berguna untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian desa.

2. Perlunya identifikasi secara jelas dan tegas untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan di desa. Hal ini untuk mengetahui kesiapan dari desa untuk melaksanakan otonomi daerah.
3. Pembagian kewenangan tidak bisa secara mutlak diterapkan di masing-masing desa yang ada di Kabupaten Magelang. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik / ciri khas baik secara geografis maupun sejarah yang dimiliki di masing-masing desa tersebut.
4. Perlunya kerjasama dengan dinas / pemerintah di atasnya yang didasarkan pada pembagian hasil / kompensasi yang jelas sehingga tidak ada yang dirugikan.
5. Adanya pengurangan intervensi dari kabupaten ke desa. Hal ini bisa dilakukan dengan mengurangi produk-produk perda yang isinya justru mengekang keleluasaan masyarakat desa untuk mengatur dirinya sendiri. Padahal banyak produk perda yang dihasilkan melalui sidang-sidang yang masih terbatas bagi kalangan elit eksekutif daerah dan badan legislatif daerah. Untuk itu seharusnya perda mengenai desa sebelum diterapkan agar disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait antara lain masyarakat, pemerintah desa, LSM yang mempunyai lingkup tugas di bidang pemerintahan desa, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

Dengan demikian setelah mengetahui kewenangan yang ada di desa, maka ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu :

1. Membentuk organisasi yang sesuai untuk melaksanakan kewenangan tersebut yang didasarkan pada kewenangan desa bukan atas keinginan atau kebutuhan pihak luar. Sistem kelembagaannya harus jelas struktur, tugas dan fungsi perangkat organisasinya yang kemudian diatur dan ditetapkan dalam perda.
2. Adanya pengalokasian anggaran dari pemerintah kabupaten untuk desa (dana perimbangan kabupaten dan desa).
3. Meningkatkan *capital element governance* desa yang bisa didapatkan dari dalam desa dan luar desa.
4. Menyusun rencana strategik pembangunan desa yang diuraikan dalam rencana operasional tahunan.

Dari tahapan-tahapan tersebut di atas maka akan tercapai suatu pelaksanaan kewenangan desa yang bisa dipertanggung jawabkan dan nantinya akan lebih meningkatkan pendapatan asli desa guna memperlancar pelaksanaan otonomi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gaffar Karim. 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. FISIP UGM.
- Benyamin Hoessin. 4 Maret 2000. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan dan Tantangan Globalisasi*, Makalah dalam Simposium Hukum ILUNI-FH. Jakarta.
- Syaukani. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar.
- Sijouan Situmorang. 2004. *Distribusi Kewenangan Pusat dan Daerah*, Makalah Depdagri pada Seminar Workshop Mencari Konsep Pengaturan Kewenangan. Jakarta.
- UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- UU No. 28 tahun 2005 tentang Kewenangan Desa.